



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 6927-6937

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Bantuan Barang Bagi Masyarakat Kurang Mampu melalui Dana Insentif Fisikal di Kabupaten Kediri

Shelly Ayu Permata Putri^{1✉}, Bayu Priambodo²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: Shellyayu97@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Program bantuan barang bagi masyarakat kurang mampu melalui dana insentif fisikal di kab Kediri merupakan bantuan berupa alat kerja yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang diharapkan dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat kabupaten Kediri. Pada implementasi kebijakan bantuan dana insentif fisikal berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi bantuan barang bagi masyarakat kurang mampu melalui dana insentif fisikal di kabupaten Kediri. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data primer dengan wawancara yang mendalam secara langsung dari berbagai informan dan data sekunder yang di dapatkan dari berbagai literatur sesuai dengan topik penelitian. Hasil penelitian yang telah dilakukan implementasi bantuan barang bagi masyarakat kurang mampu melalui dana insentif fisikal berhasil karena menurut data BPS (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri) angka kemiskinan menurun.

Kata Kunci: *Bantuan Insentif Fisikal, Implementasi Kemiskinan*

Abstract

The goods assistance program for underprivileged communities through physical incentive funds in Kediri district is assistance in the form of work tools given to underprivileged communities and registered with the DTKS (Integrated Social Welfare Data) which is expected to help alleviate poverty and improve welfare in the people of Kediri district. The implementation of the physical incentive funding assistance policy runs in accordance with the established rules. The aim of this research is to determine the implementation of goods assistance for underprivileged communities through physical incentive funds in Kediri district. The research used a descriptive method with a qualitative approach. Data collection was carried out using primary data with in-depth interviews directly from various informants and secondary data obtained from various literature according to the research topic. The results of research that has carried out the implementation of goods assistance for underprivileged communities through physical incentive funds has been successful because according to BPS data (Kediri Regency Central Statistics Agency) the poverty rate has decreased.

Keywords: Poverty, Physical Incentive Assistance, Implementation

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia yang merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional yang menjadi sebuah prioritas dari pembangunan. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan banyaknya program-program yang sudah dilaksanakan pemerintah, Upaya pengentasan kemiskinan ini dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Royat, 2007). Salah satu aspek yang sangat penting agar mendukung strategi penanggulangan dari kemiskinan yaitu data yang diperoleh akurat, karena ketika data tersebut diperoleh secara akurat maka pemerintah dapat mengambil keputusan tindakan apa yang harus dilakukan untuk dapat menanggulangi masalah kemiskinan. Selain itu data yang tersedia dapat membuat pemerintah membandingkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun.

Di Indonesia kesejahteraan masyarakat masih tergolong sangat rendah karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan saling berkaitan di dalamnya. Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional No.50/07/Th.XXVII, 1 Juli 2024, Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang, dibandingkan dengan Maret 2023 yang berjumlah 25,90 jumlah penduduk miskin menurun sebesar 1,14 juta orang dari total penduduk yang tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia (BPS Indonesia, 2024), Indonesia telah mengeluarkan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan yaitu di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pengentasan

Kemiskinan (Bantuan Langsung Tunai (BLT) dll. Sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Kediri No. 1/07/3506/Th.V 29 Juli 2024, Jumlah penduduk miskin di kab kediri presentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,95 persen, di bandingkan dengan Maret 2023 yang berjumlah 10,72 dan menurun sebesar 0,77 persen (BPS Kabupaten Kediri, 2024).

Hal ini terjadi karena masyarakat kurang mampu cenderung kesulitan untuk mencari pekerjaan dan sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang dibagi menjadi dua kategori yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural, karena kemiskinan kultural dimaknai sebagai akibat dari adanya karakter budaya etos dari cara kerja masyarakat yang lemah, sementara kemiskinan struktur dipandang sebagai akibat dari terjadinya ketidakadilan antara kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang timpang (Hutagalung et al., 2024), yang dipengaruhi oleh kurangnya dukungan struktural sehingga menyebabkan tingginya tingkat pengangguran yang ada di Indonesia dan ketidakstabilan pekerjaan yang membuat para masyarakat rentan terhadap perubahan ekonomi yang terjadi. Kenaikan harga barang yang ada di pasar seperti kebutuhan pokok yang sering berubah-ubah membuat para masyarakat Indonesia cenderung banyak yang bergantung pada sektor ekonomi yang rentan terhadap perubahan (freelance), sehingga membuat pendapatan mereka kurang stabil karena pekerjaan mereka yang musiman atau tidak tetap.

Kemiskinan juga terjadi apabila pemerintah dalam mengelola kebijakan tidak efektif dan salah sasaran serta tidak transparan yang akan menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang tergolong rendah (rentan) seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, dan lansia dan ditegaskan lagi pada pasal 7 yang berarti pemerintah bertanggung jawab penuh atas perlindungan sosial bagi masyarakat fakir miskin. Kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab dari pemerintah terutama bagi kelompok yang tergolong kurang mampu.

Desa merupakan salah satu unit pemerintahan yang terkecil dan memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional, karena desa mempunyai potensi dan sumber daya alam serta manusia yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Setiap desa tentunya mempunyai tantangan dan masalah seperti kemiskinan, ketimpangan serta keterbatasan infrastruktur dan rendahnya akses pendidikan dan kesehatan yang ada dan tentunya juga dipengaruhi oleh

degradasi lingkungan, yang membuat setiap desa membutuhkan bantuan dari pemerintah kabupaten dalam menangani permasalahan yang ada pada setiap desa.

Dalam rangka untuk menciptakan landasan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan desa, pemerintah dan DPR RI telah menerbitkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, UU tersebut menjelaskan bahwa kewenangan bagi setiap desa dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri serta demokratis yang berarti pendapatan desa merupakan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kediri agar terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis, dan Religius dan Sejahtera yang didasarkan pada Ekonomi Kerakyataan yang telah di dukung Birokrasi yang akan melayani dan merupakan strategi pembangunan desa. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola setiap wilayah secara mandiri, yang di dalamnya terdapat pengelolaan aset, keuangan, serta pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat menjadi terjamin (Firmanzah, 2014). Penerima bantuan dari dana Insentif Fisikal Tahun 2024 di Kabupaten Kediri merupakan keluarga miskin yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memiliki usaha dan perlu dikembangkan. Bantuan Dana Insentif Fisikal berupa alat atau bahan yang sesuai dengan kebutuhan penerima. Karena dengan adanya bantuan dari Dana Insentif Fisikal Tahun 2024 yang diharapkan progam ini mampu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Kediri.

Penelitian tentang Implementasi Bantuan Barang Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Kediri telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun pada penelitian ini sasaran penerima bantuan yaitu UMKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) menyerahkan bantuan barang bagi sarana UMKM melalui Dana Insentif Fisikal Tahun 2023 Kabupaten Kediri, Pemberian bantuan merupakan upaya agar pemerintah kabupaten kediri mendukung UMKM untuk bisa mandiri, bantuan barang ini berasal dari dana insentif fisikal tahun 2023 yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten kediri yang diberikan kepada 17 warga pelaku UMKM yang telah menerima bantuan sarana UMKM dari dana insentif fisikal. Peneliti tersebut yaitu (Mur, 2023). Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan teori Van Metter dan Van Horn 1975 yang meliputi 6 faktor yang berpengaruh dalam implementasi progam yaitu ukuran, dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik para pelaksana, dan sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi serta aktivitas

pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial serta politik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis Implementasi Bantuan Barang Bagi Masyarakat Kurang Mampu Melalui Dana Insentif Fisikal Di Kab Kediri untuk memahami bagaimana program tersebut dilaksanakan serta mekanisme penyaluran dan efektivitas serta dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam serta komprehensif mengenai Bantuan Fisikal bagi masyarakat kurang mampu di kab Kediri. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang dilakukan wawancara secara langsung terhadap pihak yang terkait dan peneliti juga menggunakan jenis data sekunder yang di dapatkan pada berbagai literatur sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dari pemerintah pusat dalam menangani permasalahan kemiskinan oleh Kementerian Sosial yang dilaksanakan di kab Kediri yaitu khususnya merupakan program bantuan insentif fisikal di kab Kediri yang dimulai sejak tahun 2023. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka hasil penelitian terkait Implementasi Bantuan Barang Bagi Masyarakat Kurang Mampu Melalui Dana Insentif Fisikal Di Kab Kediri yang dianalisis menggunakan teori Van Metter dan Van Horn dengan menggunakan enam variabel yaitu terkait ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik para pelaksana, serta sikap/kecenderungan para pelaksana, dan komunikasi antar organisasi, aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial, politik adalah sebagai berikut:

Variabel Pertama yaitu ukuran dan Tujuan Kebijakan di tentukan apabila standart, tujuan dan sasaran kebijakan tercapai namun jika tidak tercapai akan mengakibatkan terjadinya multi interpretasi yang sangatlah penting sebab tanpa adanya kerja sama dari aktor pelaksana akan berakibat kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Program ini sukses atau tidaknya ditentukan oleh pemerintah kabupaten, karena program ini diterapkan di setiap kecamatan yang terbagi menjadi beberapa desa dengan tujuan kebijakan penerapan program bantuan dana insentif fisikal bagi masyarakat kurang mampu di kab Kediri yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kabupaten karena dengan adanya program ini masyarakat kab Kediri

diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing, dan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan karena jika perekonomian meningkat, kesejahteraan masyarakat di kabupaten kediri akan meningkat dan akan mengurangi angka kesenjangan yang signifikan, selanjutnya untuk pemberdayaan masyarakat desa yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat desa melalui peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksana program yang diterapkan.

Variabel yang Kedua yaitu sumber daya dalam program Bantuan Fisikal bagi masyarakat kurang mampu di kab kediri, Implementasi kebijakan memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat. Karena tanpa koordinasi yang baik, program ini dapat terhambat oleh tumpang tindihnya kegiatan yang ada dan konflik kepentingan yang lain, yang sering terjadi dalam pelaksanaan program kebijakan publik (Dr.Syahrial Ramadhan, S.I.P., 2022) . Oleh karena itu diperlukan SDM dan Non SDM yang baik agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai, karena jika tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia, dan sumber daya finansial serta waktu tentunya sebuah program tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Banyak aktor yang terlibat di dalamnya yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang bertanggung jawab untuk mengelola Sumber Daya yang dananya diterima dari pemerintah pusat dan memastikan bahwa program-program yang dijalankan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, melalui kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat di dalamnya yang diharapkan dapat memenuhi tujuan dari kebijakan sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan secara optimal, Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa diharapkan dapat bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penyaluran dana insentif fisikal. Contohnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) kab kediri telah menyalurkan bantuan barang bagi masyarakat kurang mampu kepada 17 pelaku usaha di Desa Tarokan sebagai bagian dari upaya agar dapat meningkatkan produksi serta kemandirian ekonomi dari masyarakat, Selanjutnya masyarakat penerima bantuan insentif fisikal, dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat masyarakat penerima bantuan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka dengan mengembangkan usaha kecil agar lebih maju dan meningkatkan taraf hidup mereka (Nisa Mutiara et al., 2018). Secara keseluruhan, keberhasilan suatu program kebijakan sangat bergantung pada pengelolaan SDM yang efektif serta dukungan dari sumber daya non manusia. Karena tanpa adanya sinergi antara keduanya, pencapaian tujuan program akan sulit terwujud.

Variabel yang Ketiga yaitu karakteristik Para Pelaksana Progam, Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, karakteristik yang ada pada aktor pelaksana program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kab Kediri mempunyai karakteristik yang tegas, disiplin, baik dan ramah terhadap masyarakat. Sedangkan untuk karakteristik yang ideal dalam program bantuan insentif fisik bagi masyarakat kurang mampu di kab Kediri untuk mengetahui peneliti melakukan observasi lapangan dan wawancara kepada KPM untuk mengetahui bagaimana karakteristik pada masing-masing aktor pelaksana di tingkat kelurahan yaitu sudah memenuhi standar yang masing-masing aktor mempunyai sifat yang sudah tertera pada UU No. 25 Tahun 2009 yang salah satunya berbunyi bahwa pelaksanaan pelayanan publik harus berperilaku yang santun dan ramah dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat terpenuhi dengan baik.

Variabel yang Keempat yaitu Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana yang terlibat dalam program ini khususnya masyarakat penerima bantuan insentif fisik. Kepala Desa Tarokan yaitu Supandi telah memberikan apresiasi terhadap program yang sudah dijalankan karena dengan bantuan yang diterima dapat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini menunjukkan adanya respon yang positif terhadap pelaksana program terhadap tujuan yang ingin dicapai pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan di kab Kediri. Pemerintah pusat juga menginstruksikan bahwa pemerintah daerah agar lebih aktif dalam melaksanakan program-program yang telah berjalan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, Hal ini juga mencerminkan bahwa adanya dukungan penuh dari tingkat pusat terhadap inisiatif yang diambil oleh pemerintah daerah (wapresri.go.id, 2024). Secara keseluruhan sikap para pelaksana program bantuan dana insentif fisik bagi masyarakat kurang mampu di kab Kediri menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat kurang mampu melalui pengembangan bagi UMKM serta program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup pada masyarakat kabupaten Kediri.

Variabel yang Kelima yaitu, komunikasi antar Organisasi sangat penting karena dalam komunikasi yang efektif antara berbagai pihak lembaga pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan program meliputi koordinasi data yaitu adanya sinkronisasi data antara pihak Dinas Sosial, DPMPD, dan kelurahan serta pihak lainnya yang terlibat di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua penerima manfaat terdaftar pada DTKS dan masyarakat kurang mampu menerima bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun terdapat hambatan saat proses survei kepada calon penerima bantuan yang melibatkan

pihak DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa) dan pihak Kelurahan serta masyarakat penerima bantuan karena ternyata usulan penerima bantuan melebihi jumlah anggaran yang tersedia pemberian bantuan. Sehingga hal ini membuat pihak DPMD dan pihak kelurahan melakukan koordinasi untuk melakukan evaluasi ulang terhadap usulan tersebut, dengan mempertimbangkan keperluan mana yang harus dihilangkan agar sesuai dengan nominal bantuan yang telah ditentukan. Adanya Evaluasi dan Umpan Balik yang bertujuan untuk dapat menilai efektivitas dari progam serta umpan balik dari masyarakat penerima bantuan mengenai dampak yang terjadi jika bantuan telah diberikan. Dengan adanya koordinasi yang baik, progam ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dari ekonomi lokal (BKF, 2020).

Variabel yang Keenam Aktivitas Pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial, politik, Penyaluran bantuan barang bagi masyarakat kurang mampu melalui dana insentif fisikal di kab kediri telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa yang pertama pada tanggal 11 Desember 2023 di balai desa tarokan yang ditujukan kepada 17 pelaku UMKM, Bantuan Insentif Fisikal diserahkan secara langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (DPMPD) Agus Cahyono yang mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan sebuah progam dari Bupati Kediri berupa bantuan alat kerja kepada pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Kepala desa tarokan juga mengapresiasi serta berterimakasih kepada pemerintah yang telah menyalurkan bantuan barang bagi sarana UMKM melalui dana insentif Fisikal Tahun 2023. Dan yang kedua penyerahan bantuan barang dari dana insentif fisikal kabupaten kediri dilaksanakan pada tanggal 18 september 2024 yang ditujukan kepada 33 desa pada 11 kecamatan yang menjadi prioritas wilayah bidang kemiskinan yaitu kecamatan badas, banyakan, grogol, kayen kidul, kunjang, mojo, papar, puncu, purwoasri semen, dan tarokan. Penyerahan bantuan Insentif Fisikal ini dihadiri dan diserahkan secara langsung oleh wakil bupati kabupaten kediri Dewi Mariya Ulfa S.T di Pendopo Panjalu Jayati. Penyerahan bantuan ini berupa bantuan alat kerja sesuai dengan usaha yang sudah dijalankan, masyarakat yang menerima bantuan harus terdata di DTKS, penyerahan bantuan terhadap masyarakat kurang mampu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat dan mengentaskan kemiskinan masyarakat kabupaten kediri. Penyerahan bantuan dalam lingkungan ekonomi untuk masyarakat kurang mampu diharapkan dengan bantuan dana insentif fisikal dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk lebih mandiri dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal

serta dari pemerintah pusat juga diharapkan dapat memberikan alokasi secara khusus bagi daerah yang tertinggal untuk meningkatkan infrastruktur serta layanan dasar bagi masyarakat sekitar pemberian bantuan barang bagi masyarakat kurang mampu melalui dana insentif fisik diharapkan dapat menjaga stabilitas harga barang dan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional, hal ini juga menunjukkan komitmen dari pemerintah pusat dalam memperbaiki kondisi ekonomi yang ada di daerah. Lingkungan sosial yaitu meliputi partisipasi dari masyarakat penerima bantuan karena lingkungan yang positif juga sangat penting karena mendukung penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan secara lebih optimal dan bisa berkembang, namun pemilihan dalam penyedia barang yang tepat juga menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan berdampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu. Selanjutnya lingkungan politik juga berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat kabupaten kediri karena pada program ini jika masyarakat kurang mampu masih belum terdaftar di DTKS sehingga tidak mendapatkan bantuan, pemerintah daerah terus mencari solusi untuk menjangkau mereka agar tetap mendapatkan bantuan program yang lain.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Program bantuan dari dana insentif fisik diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan taraf hidup masyarakat kabupaten kediri sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal. Keberhasilan program bantuan dana insentif fisik diukur dengan penurunan angka Jumlah penduduk miskin di kab kediri presentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,95 persen, di bandingkan dengan Maret 2023 yang berjumlah 10,72 dan menurun sebesar 0,77 persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keberhasilan program dari pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, keberhasilan program ini diukur setelah pemberian bantuan kepada masyarakat yang menunjukkan fakta di lapangan bahwa terjadi peningkatan produksi dan pendapatan pelaku usaha.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa telah berhasil menyalurkan bantuan dana insentif fisik bagi masyarakat kurang mampu di kabupaten kediri karena peran dari SDM dan Non SDM yang bekerjasama dan berkolaborasi agar program ini dapat berjalan dengan lancar mulai dari pendataan dan survei yang

dilakukan oleh Tim Dinas DPMPD yang bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk perangkat desa yang terlibat dan lembaga kemasyarakatan agar memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan kondisi masyarakat, hal ini dilakukan agar penerima bantuan tidak salah sasaran sehingga dilakukan pengecekan pada DTKS yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- (3) Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan karakteristik pelaksana program kegiatan bantuan dana insentif fisik bagi masyarakat kurang mampu di kabupaten Kediri menunjukkan sikap yang tegas membantu mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama proses implementasi program ini dilaksanakan, disiplin dalam melaksanakan tugas yang terlihat dari ketepatan waktu dalam pelaksanaan program karena semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sikap baik dan ramah kepada masyarakat yang mendorong masyarakat lebih aktif dan ikut berpartisipasi terhadap program-program dari pemerintah.
- (4) Program bantuan dana insentif fisik bagi masyarakat kurang mampu di kabupaten Kediri menunjukkan hasil yang positif serta potensi yang besar bagi masyarakat kurang mampu yang mempunyai usaha. Sikap para pelaksana program dan penerima program menunjukkan sikap yang positif dan respon yang baik bagi masyarakat sekitar, karena dengan terus melakukan evaluasi serta perbaikan yang terus dilakukan dalam meningkatkan program diharapkan dengan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk menurunkan angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten.
- (5) Komunikasi antar organisasi yang dilakukan antara DPMPD dan kelurahan sangat krusial dalam melaksanakan program bantuan sosial. Karena koordinasi data yang baik dapat memastikan bahwa semua penerima bantuan terdaftar dengan akurat dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah tepat sasaran, hambatan ini muncul saat usulan penerima bantuan yang melebihi anggaran, hal inilah yang menuntut evaluasi ulang dan memprioritaskan kebutuhan yang mendesak, sehingga komunikasi yang efektif dan kolaborasi antar lembaga yang menjadi kunci keberhasilan program dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (6) Aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, politik program dan penerima program menunjukkan respon yang positif karena dengan adanya program ini yang secara langsung menjangkau masyarakat kurang mampu yang terdata dalam DTKS sehingga dengan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta

pendapatan masyarakat yang menerima bantuan dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja yang baru bagi masyarakat kurang mampu, program ini melibatkan masyarakat secara langsung agar masyarakat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan program.

DAFTAR PUSTAKA

- BKF. (2020). Laporan Kajian Program Bantuan Modal Usaha Mikro. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 1–86.
- BPS Indonesia, S. I. (2024). Catalog : 1101001. Statistik Indonesia 2024, 1101001, 790. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- BPS Kabupaten Kediri. (2024). Profil Kemiskinan di Kabupaten Kediri. Berita Resmi Statistik, 05, 1–16.
- Dr.Syahril Ramadhan, S,I.P., M. S. (2022). Implementasi Kebijakan Publik (Vol. 16, Issue 1). Firmanzah, 2014. (2014). Pembangunan partisipatif melalui UU Desa.
- Hutagalung, A., Mailsari, E., Rahmanti, N., & Nugraha, L. (2024). Penerapan Aplikasi Siks-Ng Dalam Penerimaan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Dikelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan. 17(1), 83–87.
- Mur. (2023). Mega Pos.Id. 11-12-2023. <https://megapos.co.id/2023/12/11/dinas-pmpd-kabupaten-kediri-salurkan-bantuan-barang-sarana-umkm-melalui-dana-insentif-fiskal-2023/>
- Nisa Mutiara, Djoko Mursinto, & Zainuddin Maliki. (2018). Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam. Wadiah, 2(2), 69–85. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v2i2.2995>
- Royat, S. (2007). Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Materi Assisten Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan Pada Seminar Nasional: Meningkatkan Peran Sektor Pertanian Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Tanggal, 21.
- wapresri.go.id. (2024). Serahkan Insentif Fiskal 2024, Wapres Instruksikan Pemda Perkuat Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 18 September 2024. https://www.setneg.go.id/baca/index/serahkan_insentif_fiskal_2024_wapres_instruksikan_pemda_perkuat_program_percepatan_penghapusan_kemiskinan_ekstrem.